

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Meningkatnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia baik secara materiil maupun spirituil merupakan tujuan dari proses pembangunan yang ada di Indonesia. Untuk melaksanakan proses pembangunan ini dibutuhkan kerjasama yang bersinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia dikenal banyak memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, namun kurangnya perencanaan yang matang serta pengelolaan yang kurang optimal mengakibatkan tujuan pembangunan masih jauh dari cita-cita yang dicanangkan. Dengan adanya jumlah penduduk yang cukup besar seharusnya merupakan modal dasar yang cukup potensial dalam pelaksanaan pembangunan, namun kenyataan yang ada justru sering dituding sebagai faktor penghambat pembangunan yang ada di Indonesia.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional untuk mengupayakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam ataupun potensi yang ada di daerah, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Selain faktor sumber daya manusia dan sumber daya alam maupun potensi daerah, yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah yaitu tersedianya dana yang memadai baik dari subsidi pemerintah pusat ataupun Pendapatan

Otonomi daerah ditujukan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah berdasar asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat perlu perbaikan di segala bidang, terutama bidang keuangan daerah supaya pemerintah daerah mampu melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk lebih mandiri dan berkembang.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari beberapa sektor oleh daerah tersebut. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah, Pendapatan Asli Daerah selalu dipandang sebagai salah satu indikator untuk mengukur ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan kepada pemerintah pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah.

Kondisi keuangan negara yang kritis karena himpitan berbagai krisis mengakibatkan sumber-sumber penerimaan negara dalam negeri dan penerimaan pembangunan tidak dapat lagi diandalkan. Oleh karena itu, alokasi anggaran belanja untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terkena dampaknya. Salah satu alokasi anggaran belanja yang terkena dampak berbagai krisis tersebut adalah alokasi anggaran belanja dari

pusat ke daerah. Bersamaan dengan pemberian peran yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, instansi dan pelaku ekonomi daerah dalam menangani pembangunannya (otonomi atau desentralisasi diperluas), akan berdampak pada pengalokasian anggaran belanja sehingga memacu daerah untuk mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunannya. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat digali adalah sektor retribusi daerah melalui pendapatan dari industri pariwisata.

Industri pariwisata merupakan jenis industri yang mempunyai matarantai kegiatan yang sangat panjang. Banyak kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata. Hal ini berarti banyak industri lain yang dapat digerakan oleh industri pariwisata seperti kegiatan biro perjalanan, transportasi, perhotelan, restoran, kesenian dan budaya daerah, kerajinan rakyat, guider untuk memandu wisatawan mancanegara, pameran dan olah raga internasional yang diselenggarakan di daerah-daerah, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai keindahan alam dan kekayaan atraksi budaya yang menawan mempunyai kesempatan untuk menjual keindahan alam dan atraksi budayanya kepada wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang akan menikmati keindahan alam dan budaya tersebut. Wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang menikmati keindahan alam dan budaya tersebut akan mendatangkan *income* bagi daerah yang dilunjuainya. Bagi wisatawan mancanegara yang datang

dari luar negeri, tentu kedatangan mereka akan mendatangkan devisa bagi negara. Hal ini tentunya akan menjadi acuan bagi daerah-daerah untuk dapat mengembangkan dan mengelola pariwisata agar dapat mendatangkan sumber dana untuk sektor retribusi daerah.

Salah satu sektor yang menyumbang peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sektor retribusi daerah. Restribusi berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Untuk peraturan retribusi Daerah Tingkat II cukup disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Sedangkan peraturan retribusi Daerah Tingkat I disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 memuat tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, pada bab VII pasal 157 memuat tentang pendapatan belanja dan pembiayaan. Sesuai Undang –Undang tersebut sumber pendapatan daerah adalah :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

B. Dana perimbangan.

C. Lain-lain pendapatan yang sah.

Supaya retribusi daerah dapat berfungsi secara efektif, maka tidak hanya pertimbangan secara ekonomi dan fisik saja, tetapi juga harus di dukung oleh peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk

membayar retribusi atas jasa yang telah diperolehnya. Pada retribusi daerah, retribusi yang di pungut akan ada imbalan jasa langsung yang diberikan oleh pemerintah daerah pada yang bersangkutan. Imbalan tersebut dapat berupa fasilitas yang memadai ataupun pelayanan oleh pemerintah daerah dan instansi yang terkait.

Retribusi sektor pariwisata merupakan salah satu sumber retribusi daerah, dimana pada sektor ini mempunyai peran yang penting dan sangat mendukung dalam meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Sektor pariwisata merupakan peluang yang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan ekonomi nasional, karena dapat mendatangkan devisa bagi negara dan menambah dana untuk perkembangan daerah itu sendiri. Pariwisata telah tumbuh menjadi sebuah komoditi yang sangat menguntungkan dan memiliki prospek yang cerah dimasa yang akan datang. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah lain juga sangat menguntungkan bagi daerah yang menjadi tujuan wisata.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan propinsi yang menjadi tujuan wisata yang banyak diburu oleh wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Hal ini terjadi karena Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat banyak obyek wisata, baik obyek wisata alam atau obyek wisata budaya. Obyek wisata yang tersebar di kotamadya Yogyakarta maupun kabupaten-kabupaten mempunyai keunggulan tersendiri untuk memikat para wisatawan. Predikat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya dan kota pendidikan serta keadaannya yang kondusif juga merupakan faktor daya tarik

untuk mengunjungi 'kota gudeg' ini. Letak geografis Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di tengah-tengah propinsi Jawa Tengah tentu sangat menguntungkan, karena bagi wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang mengunjungi obyek wisata yang berada di Jawa Tengah tentu saja mereka akan menyempatkan diri untuk singgah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan menikmati fasilitas serta keramahtamahan masyarakatnya. Untuk itu pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dikembangkan lebih serius, karena sektor ini mempunyai prospek bisnis ataupun sosial yang cukup cerah bagi peningkatan pendapatan restribusi daerah serta masyarakat sekitarnya.

Perkembangan kunjungan wisatawan dari tahun ketahun mengalami banyak perubahan walaupun tidak begitu signifikan. Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapat keuntungan dari sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan retribusi daerah. Tentu saja masyarakat yang ada disekitar akan mendapat manfaat dan keuntungan yang dapat meningkatkan pendapatan serta taraf hidup mereka. Hal ini tentu sangat positif bagi perkembangan kepariwisataan yang ada, oleh karena itu perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana harus di tindak lanjuti secara serius dan bertahap. Dengan semakin baiknya fasilitas-fasilitas umum dan pelayanan yang di berikan diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Peningkatan tersebut akan menambah atau meningkatkan retribusi daerah dan Pendapatan

Asli Daerah serta pendapatan masyarakat sekitar, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Promosi merupakan hal yang cukup vital dalam pengembangan kepariwisataan, oleh karena itu instansi yang terkait harus memiliki jurus jitu agar dapat diketahui dan diterima masyarakat banyak. Pengembangan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hakekatnya sejalan dengan pengembangan ekonomi (*economic development*) yang juga dicanangkan sebagai program TTI (*Trade Tourism Investment*). Promosi wisata dikiranya perlu dilakukan dengan seksama guna mengundang berbagai kalangan pebisnis, investor, wisatawan dan peneliti dari berbagai negara untuk datang ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pada gilirannya Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat meraih predikat *leading economic region* di Asia dalam jenjang pariwisata dan investasi. Sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khusus dari retribusi pariwisata.

Semakin berkembangnya dan meningkatnya pembangunan Kabupaten Sleman di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentu akan membawa dampak positif bagi sektor pariwisata khususnya retribusi untuk peningkatan retribusi daerah. Retribusi pariwisata dapat menjadi sumber dana retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial. Besarnya tingkat kemandirian Daerah Tingkat II, dalam artian mampu membiayai sendiri segala urusan otonomi daerah tidak terlepas dari pendanaan yang cukup dari pusat maupun dari daerah. Oleh karena itu tidak begitu berlebihan jika

pengembangan sektor pariwisata dirasa sangat perlu guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang mampu menopang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disamping beberapa kabupaten lainnya (Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kotamadya Yogyakarta), dimana didaerah ini terdapat banyak obyek wisata yang sangat potensial dan perlu dikembangkan dengan serius. Dengan pengembangan dan promosi yang cukup, tentu perkembangan pariwisata di Kabupaten Sleman akan semakin pesat. Dan ini merupakan point unggulan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pariwisata. Tentunya juga akan membawa masyarakat kepada kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Melihat potensi yang ada ini mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang retribusi pariwisata yang dapat menjadi andalan sektor retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"PERANAN RETRIBUSI PARIWISATA TERHADAP UPAYA PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH"** Studi Kasus di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2002-2006.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang masalah yang ada, penulis mencoba merumuskan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi retribusi pariwisata terhadap retribusi daerah di Kabupaten Sleman ?.
2. Seberapa besar tingkat efektifitas retribusi pariwisata di Kabupaten Sleman ?.
3. Seberapa besar tingkat efektifitas retribusi daerah di Kabupaten Sleman ?.

C. Batasan Masalah Penelitian

Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak kawasan wisata unggulan yang tersebar di beberapa kabupaten dan kotamadya. Beberapa kawasan wisata unggulan itu terdapat di Kabupaten Sleman. Dari sektor pariwisata ini akan dapat banyak diperoleh manfaat untuk pemerintah daerah maupun langsung oleh masyarakat. Masalah pariwisata ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dari berbagai aspek, khususnya aspek retribusi pariwisata dan aspek retribusi daerah yang berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari uraian diatas, terlihat bahwa retribusi sektor pariwisata dan bagaimana cara meningkatkan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah menjadi masalah yang penting dalam strategi

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis membatasi masalah penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang dilakukan mengenai retribusi pariwisata dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Sleman.

D. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi pariwisata terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Sleman.
- b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas retribusi pariwisata di Kabupaten Sleman.
- c. Untuk mengetahui tingkat efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Sleman.

E. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai latihan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dalam masalah retribusi sektor pariwisata peranannya terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Sleman sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan juga untuk memahami pengetahuan secara praktis tentang keuangan daerah khususnya retribusi pariwisata dalam upaya peningkatan Retribusi Daerah sebagai bahan perbandingan dengan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah

b. Bagi pemerintah Kabupaten Sleman

Dengan penelitian ini diharapkan adanya masukan pemikiran dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari retribusi daerah melalui retribusi pariwisata. Dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan pembuat kebijakan (policy-makers) untuk menetapkan kebijaksanaan di sektor pariwisata.

c. Bagi Pihak Swasta

Sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan bantuan materiil berupa sarana ataupun prasarana yang mampu memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Sleman.

d. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah perbendaharaan khasanah tulisan-tulisan sebagai dasar informasi dan perbandingan bagi